

## Filosofi dan Kebijakan: Strategi Pengentasan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Provinsi Bengkulu

Lesti Heriyanti<sup>1a</sup>, Bambang Tri Sasongko Adi<sup>2b\*</sup>, Oman Sukmana<sup>3c</sup>, Vina Salviana D. Soedarwo<sup>4d</sup>

Program Doktor Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

lestiheriyanti@umb.ac.id<sup>a</sup>, bambangtsa@hatfieldgroup.com<sup>b,\*</sup>, oman@umm.ac.id<sup>c</sup>, vina@umm.ac.id<sup>d</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis filosofi yang mendasari kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Provinsi Bengkulu dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran nilai-nilai lokal dan partisipasi komunitas dalam keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif yang mempertimbangkan konteks lokal dan mengintegrasikan pengetahuan serta praktik tradisional masyarakat nelayan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan akses terhadap modal usaha mikro, penguatan program pelatihan kewirausahaan, dan promosi praktik berkelanjutan. Kesimpulannya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kebijakan pengentasan kemiskinan, masyarakat nelayan, nilai lokal, pemberdayaan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, Bengkulu

**Abstract:** This study analyzes the philosophy underlying poverty alleviation policies in the fishing communities of Bengkulu Province and how these policies are implemented on the ground. Using a literature review and policy analysis approach, the study reveals various challenges faced in policy implementation, including limited resources, inadequate infrastructure, and resistance to change. Furthermore, the study highlights the importance of local values and community participation in the success of poverty alleviation policies. The findings suggest that to enhance policy effectiveness, a more inclusive and adaptive approach is needed that considers local contexts and integrates the knowledge and traditional practices of fishing communities. Key recommendations include improving access to micro-business capital, strengthening entrepreneurship training programs, and promoting sustainable practices. In conclusion, poverty alleviation policies that are responsive to local values and actively involve community participation will be more effective and sustainable.

**Keywords:** poverty alleviation policies, fishing communities, local values, economic empowerment, sustainable development, Bengkulu

**Article info:** Submitted | Accepted | Published  
04-09-2024 | 20-10-2024 | 30-10-2024

### LATAR BELAKANG

Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatra dan memiliki garis pantai sepanjang 525 kilometer yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Letak geografis ini menjadikan sebagian besar masyarakat di wilayah ini, terutama yang tinggal di daerah pesisir, sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber utama penghidupan mereka. Namun,

meskipun memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, masyarakat nelayan di Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan yang tinggi, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan di Bengkulu tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti perubahan iklim, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak, serta praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Bengkulu sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan pasir, pembuangan limbah rumah tangga, dan penebangan hutan bakau. Kerusakan ini tidak hanya mengurangi produktivitas laut tetapi juga memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan yang sudah rentan (Nopianti et al., 2015).

Mengingat kondisi tersebut, upaya pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Bengkulu menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini, seperti program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial, sering kali belum efektif dan kurang mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat nelayan. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang filosofi dan nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat nelayan tersebut. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak mempertimbangkan praktik dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut justru dapat memicu resistensi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi yang mendasari kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Provinsi Bengkulu (misal: Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 atau Perda Bengkulu No. 2 Tahun 2023 Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin), serta mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam konteks lokal. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat nelayan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi kebijakan. Partisipasi ini bukan hanya dalam bentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah, tetapi juga dalam bentuk pengakuan dan integrasi pengetahuan serta praktik tradisional masyarakat nelayan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Misalnya, praktik adat seperti larangan menggunakan bahan peledak dan racun dalam menangkap ikan, atau penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan, merupakan bentuk-bentuk pengetahuan lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut (Ambarini et al., 2018).

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada filosofi dan nilai-nilai lokal juga dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini karena kebijakan yang demikian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan

kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal dan berbasis partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana filosofi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat nelayan di Bengkulu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis filosofi yang mendasari dan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditujukan bagi masyarakat nelayan di Bengkulu. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan ini selaras dengan nilai budaya dan struktur sosial masyarakat, serta mengusulkan perbaikan berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan literatur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengevaluasi dan menganalisis filosofi yang mendasari kebijakan pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Provinsi Bengkulu. Studi literatur ini dilakukan dengan mengkaji berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (misal: Inpres No. 4 Tahun 2022, Perda No. 2 Tahun 2023), serta data empiris yang tersedia mengenai kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat nelayan di wilayah ini.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek filosofis dan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal akademik, laporan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya yang menggambarkan kebijakan, program, serta kondisi lapangan di Bengkulu.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masyarakat nelayan di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam serta tantangan yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya laut. Berdasarkan berbagai studi sebelumnya, lokasi penelitian ini meliputi daerah pesisir seperti Teluk Sepang, Pulau Baai, Pantai Panjang, dan Tapak Paderi. Daerah-daerah ini dipilih karena mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat nelayan, termasuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga nelayan. Selain itu, penelitian di daerah ini juga mengungkap peran penting nilai-nilai lokal dan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya serta pemberdayaan ekonomi, khususnya melalui kelompok usaha bersama dan pemberdayaan perempuan. Lokasi-lokasi ini memberikan gambaran yang representatif tentang bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diimplementasikan secara efektif dengan mempertimbangkan konteks lokal dan partisipasi masyarakat (Hartono, 2021; Nopianti et al., 2015).

### **Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui metode studi literatur (Kusumastuti & Khoiron, 2019; Supriyanto et al., 2022) dengan meninjau berbagai sumber sekunder yang mencakup:

- Jurnal Akademik dan Penelitian Terdahulu: Artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal akademik yang relevan memberikan informasi mengenai kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat nelayan di Bengkulu, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan (Hartono, 2021; Nopianti et al., 2015; Osira et al., 2017; Thadi et al., 2023).
- Laporan Pemerintah: Laporan dari instansi pemerintah daerah dan nasional yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya laut, program pemberdayaan masyarakat, dan inisiatif pengentasan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023; Pemerintah Kota Bengkulu, 2019).
- Dokumen Kebijakan dan Program: Dokumen resmi yang merinci kebijakan dan program yang diterapkan di wilayah studi, termasuk kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, serta strategi pengelolaan lingkungan pesisir (Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2023, Perda No. 2 Tahun 2020).

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul dari studi literatur. Proses analisis mencakup tahap-tahap berikut (Fajri, 2022; Kuntoro, 1994; Nilamsari, 2014):

- Reduksi Data: Memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu filosofi kebijakan pengentasan kemiskinan dan nilai-nilai lokal masyarakat nelayan.
- Penyajian Data: Menyusun data yang telah direduksi ke dalam format yang sistematis untuk memudahkan interpretasi dan analisis lebih lanjut.
- Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul dari analisis data, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Provinsi Bengkulu telah diterapkan melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi mereka. Beberapa kebijakan utama yang telah diimplementasikan meliputi:

- Program Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui diversifikasi sumber pendapatan. Salah satu contoh adalah pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Kerja (POKJA) yang memfasilitasi perempuan nelayan dalam memproduksi berbagai produk olahan laut, seperti udang kering, ikan asin, kerupuk, dan abon (Fernando et al., 2001; Ramadhani, 2017). Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan nelayan dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga mereka dengan memberikan

pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknologi tepat guna, seperti alat pengeringan ikan dan fiber penyimpanan ikan.

- Pelatihan Kewirausahaan dan Penguatan Ekonomi: Selain memberikan bantuan peralatan, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menyelenggarakan berbagai pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini mencakup teknik produksi yang efisien, manajemen keuangan, dan pemasaran produk, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial nelayan serta anggota keluarganya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan, dampaknya sering kali terbatas oleh tantangan lain, seperti keterbatasan akses ke pasar dan modal usaha (Asnaini et al., 2019, 2022).
- Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut: Kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut juga telah diterapkan, termasuk larangan penggunaan bahan peledak dan racun dalam penangkapan ikan serta promosi penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi lingkungan pesisir dari degradasi lebih lanjut. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai (Alvayedo & Erliyana, 2022).

### **Peran Masyarakat dan Nilai Lokal**

Peran masyarakat dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan sangat penting di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan memiliki berbagai nilai lokal dan praktik tradisional yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah, di antaranya:

- Nilai dan Praktik Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya: Masyarakat nelayan di Bengkulu memiliki sejumlah nilai dan praktik lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut. Misalnya, penggunaan alat tangkap tradisional, larangan penggunaan bahan peledak dan racun, serta aturan adat mengenai batas wilayah tangkapan merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dapat mendukung praktik pengelolaan yang berkelanjutan (Kholis et al., 2022). Nilai-nilai ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk melindungi lingkungan laut dan memastikan kelangsungan hidup masyarakat nelayan (Alvayedo & Erliyana, 2022).
- Partisipasi Komunitas dalam Program Pemberdayaan: Partisipasi aktif komunitas nelayan, terutama perempuan, dalam program pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Sebagai contoh, keterlibatan perempuan dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Kerja (POKJA) tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas komunitas (Fernando et al., 2001).
- Tantangan dalam Integrasi Nilai Lokal dan Kebijakan: Meskipun nilai lokal dan partisipasi komunitas memainkan peran penting dalam keberhasilan program, ada tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan formal. Perbedaan antara nilai-nilai tradisional dan pendekatan kebijakan modern dapat menciptakan ketegangan dan resistensi di antara anggota komunitas yang merasa kebijakan pemerintah tidak

sepenuhnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka (Barlinti, 2007; Murdiyana & Mulyana, 2017). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya dan program pengentasan kemiskinan.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Kebijakan Pusat dan Daerah terkait Pengentasan Kemiskinan**

Mengaitkan filosofi kebijakan pengentasan kemiskinan nasional dengan studi kasus di Provinsi Bengkulu, kita dapat melihat keselarasan pendekatan yang diambil. Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu tahun 2020 dan 2023 tentang pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Pemerintah Provinsi Bengkulu fokus pada integrasi program lintas sektor, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin.

Sebagai contoh, Peraturan Daerah Bengkulu tahun 2020 dan 2023 mencerminkan komitmen daerah untuk melakukan penanganan kemiskinan melalui penguatan kapasitas usaha mikro dan kecil serta pemberian bantuan sosial yang terintegrasi. Ini selaras dengan strategi nasional yang menekankan pada peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin serta pengurangan beban pengeluaran mereka. Kebijakan daerah ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan program yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran secara efektif, mirip dengan pendekatan kebijakan nasional yang menekankan pada kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat (Agwil et al., 2022; Wahyudi et al., 2023). Pembahasan tentang kajian kebijakan dan bagaimana implementasi di lapangan dengan studi kasus di Provinsi Bengkulu disajikan pada bagian berikut.

### **Filosofi Kebijakan dan Implementasi di Lapangan**

Kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Bengkulu didasarkan pada filosofi pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan yang berusaha menggabungkan antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Wahyudi et al., 2023). Filosofi ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial (WCED, 1987). Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan sering kali menghadapi tantangan untuk mencapai keseimbangan ini.

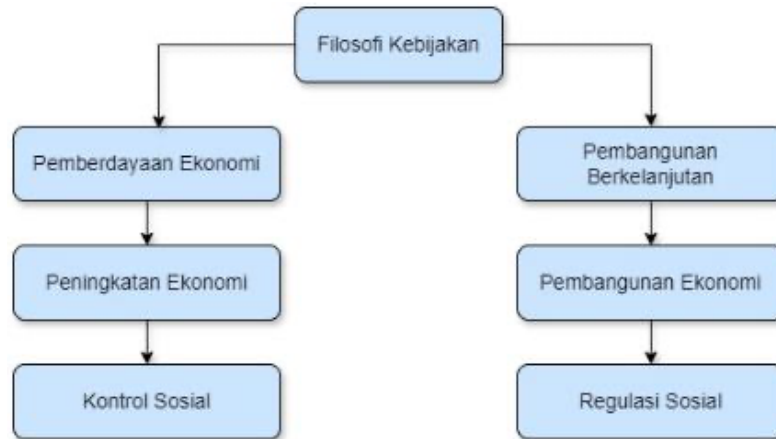
Sebagai contoh, kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk perempuan nelayan di Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memberdayakan perempuan. Berdasarkan teori pemberdayaan (Ahmad Rizal & Syaiful Bahri, 2022; Habib, 2021), pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks masyarakat nelayan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan nelayan dan memperkuat peran mereka dalam komunitas.

Namun, meskipun kebijakan ini didasarkan pada prinsip pemberdayaan, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kesenjangan antara niat kebijakan dan realitas di lapangan. Banyak perempuan nelayan yang merasa sulit untuk berpartisipasi penuh dalam program ini karena tanggung jawab domestik yang berat dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang memadai. Selain itu, ketidaksetaraan gender yang masih kuat di beberapa komunitas nelayan menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif (Hartono, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemberdayaan ekonomi memiliki filosofi yang baik, realitas sosial budaya sering kali menghalangi implementasi yang efektif.

Kesenjangan lain antara filosofi kebijakan dan implementasi di lapangan dapat dilihat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Meskipun kebijakan ini berusaha untuk melindungi dan melestarikan sumber daya laut melalui regulasi yang ketat dan promosi praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, efektivitasnya sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai (Fatchiya, 2008; Nurhab et al., 2021). Sebagai contoh, larangan penggunaan bahan peledak dan racun dalam penangkapan ikan sering kali diabaikan oleh nelayan dari luar daerah yang tidak memiliki keterikatan dengan nilai-nilai lokal masyarakat nelayan Bengkulu (Nopianti et al., 2015).

Menurut teori kontrol sosial (Mahdalena & Yusuf, 2017), efektivitas regulasi sangat bergantung pada seberapa baik aturan dan norma yang diterapkan diinternalisasi oleh anggota masyarakat. Dalam kasus masyarakat nelayan Bengkulu, nilai-nilai lokal seperti larangan penggunaan alat tangkap destruktif telah menjadi bagian dari budaya mereka dan berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif. Namun, ketika regulasi formal yang diperkenalkan oleh pemerintah tidak didukung oleh kesadaran dan komitmen masyarakat luas, efektivitas regulasi tersebut menjadi terbatas.

Selain itu, terdapat juga masalah ketidaksesuaian antara filosofi pembangunan berkelanjutan yang mendasari kebijakan ini dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek masyarakat nelayan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, beberapa nelayan mungkin merasa terpaksa melanggar aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi kebijakan harus lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat sasaran, termasuk mempertimbangkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong praktik yang tidak berkelanjutan. Ilustrasi keterkaitan komponen filosofi kebijakan digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Diagram keterkaitan komponen filosofi kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan.**

### Hambatan dan Peluang

Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Bengkulu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung program-program pemberdayaan. Banyak program yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor, yang sering kali tidak mencukupi untuk mencakup semua kebutuhan masyarakat nelayan yang tersebar luas. Keterbatasan ini menghambat kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelatihan, peralatan, dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Hartono, 2021).

Selain keterbatasan finansial, infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan. Banyak daerah pesisir di Bengkulu yang masih kurang berkembang dari segi infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas penyimpanan hasil laut. Kekurangan ini mengurangi akses nelayan ke pasar dan menghambat kemampuan mereka untuk memasarkan produk secara efektif, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Meskipun kebijakan pemerintah berusaha untuk mendorong praktik-praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan modernisasi ekonomi nelayan, beberapa anggota komunitas mungkin merasa bahwa pendekatan baru ini bertentangan dengan cara hidup tradisional mereka. Menurut teori perubahan sosial (Santoso et al., 2021; Tianingsih et al., 2021), adopsi inovasi sering kali mengalami resistensi karena adanya ketakutan akan kehilangan identitas budaya atau keraguan terhadap efektivitas perubahan tersebut.

Meskipun demikian, terdapat peluang-peluang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Bengkulu. Salah satu peluang utama adalah memanfaatkan pengetahuan lokal dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat nelayan. Sebagai contoh, praktik-praktik adat dalam pengelolaan sumber daya laut yang sudah terbukti efektif dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan formal untuk

meningkatkan keberlanjutan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Nopianti et al., 2015).

Peningkatan keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan juga merupakan peluang penting. Melibatkan komunitas secara aktif tidak hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selain itu, promosi praktik berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas dapat membantu mengatasi resistensi terhadap perubahan.

Dalam konteks ini, teori partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969) menjadi relevan, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, kebijakan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan Bengkulu dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi filosofi yang mendasari kebijakan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada implementasi di lapangan dan peran masyarakat serta nilai-nilai lokal. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun kebijakan pengentasan kemiskinan memiliki filosofi pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan yang kuat, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan resistensi terhadap perubahan. Pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan pemberdayaan ekonomi menjadi sangat jelas dalam konteks masyarakat nelayan Bengkulu. Nilai-nilai lokal seperti penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan dan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, menunjukkan bahwa pengetahuan dan praktik lokal dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hambatan-hambatan seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta kendala budaya dan struktural, menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi peningkatan akses terhadap modal usaha mikro, penguatan program pelatihan kewirausahaan, dan promosi praktik berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di masyarakat nelayan, kebijakan perlu lebih responsif terhadap realitas lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini akan membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

## REFERENSI

- Agwil, W., Agustina, D., Fransiska, H., & Hidayati, N. (2022). Klasifikasi Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Menggunakan Metode Pohon Klasifikasi Gabungan. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 14(2), 23–32.
- Ahmad Rizal, D., & Syaiful Bahri, M. (2022). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam

- Pandangan Karl Marx Dan Max Weber. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(2), 189–209. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5444>.
- Alvayedo, M. B., & Erliyana, A. (2022). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 9730–9739. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3220/http>
- Ambarini, N. S. B., Satmaidi, E., & Sofyan, T. (2018). Usaha Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 182–197. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.15>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *AIP Journal*, July, 216–224. <https://doi.org/10.4324/9781315748504-47>
- Asnaini, A., Yustati, H., & Harpepen, A. (2022). Model for Empowerment of Coastal Fisheries Products in Jakat Beach, Bengkulu. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 484–513. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.6230>
- Asnaini, Arisandy, Y., & Fryanti, Y. E. (2019). *Pemberdayaan Komunitas Ibu Rumah Tangga Kampung Nelayan Sejahtera Pulau Baai Kota Bengkulu Dalam Mendampingi Pendidikan Agama Dan Mengelola Kemandirian Ekonomi Keluarga* (O. Alek (ed.)). Rumah Cetak Vanda.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2023. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu* (Vol. 1, Issue 43). BPS Provinsi Bengkulu.
- Barlinti, Y. S. (2007). Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Lex Jurnalica Vol.4*, 4(3), 158–167.
- Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>
- Fatchiya, A. (2008). Model Aksi Sosial pada Masyarakat Petambak di Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. *Buletin Ekonomi Perikanan*, 8(2), 1–22.
- Fernando, M., Sisworahardjo, S., & Adi, I. R. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus di Desa Bantal Kabupaten Bengkulu Utara* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71103&lokasi=lokal>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Hartono, R. (2021). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(1), 241–250. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v4i1.1285>
- Kholis, M. N., Fratnesi, F., & Wahidin, L. O. (2022). Strategi Bertahan Hidup Nelayan Pasca Covid 19: Kasus Nelayan Jaring Insang Kota Bengkulu. *Pelagicus: Jurnal IPTEK Terapan Perikanan Dan Kelautan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/plgc.v3i1.10528> Copyright
- Kuntoro, S. A. (1994). Action Research: Metode Pengembangan dan Partisipasi. *Cakrawala Pendidikan*, 2(XIII), 147–158.
- Mahdalena, Y., & Yusuf, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 713–736.

- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nopianti, H., Hanum, S. H., & Widiono, S. (2015). Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Pelestarian Sumberdaya Pesisir Di Kota Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.33369/jsn.1.1.38-47>
- Nurhab, B., El Wardah, K., & Fryanti, Y. E. (2021). Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis Umkm Unit Pengolahan Ikan Melalui Bmt lain Bengkulu. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(01), 1080–1093. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5641>
- Osira, Y., Afrita, D., & Himawati, I. P. (2017). Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan Kota Bengkulu Terhadap Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.37676/professional.v4i1.449>
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2019). *LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial Kota Bengkulu 2019*. Dinas Sosial Kota Bengkulu.
- Ramadhani, A. (2017). *Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat dalam Meningkatkan Pendapatan, Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Santoso, R. A., Ruja, I. N., Purnomo, A., Pramesthi, R., & Azzahroh, P. M. (2021). Perubahan sosial masyarakat nelayan di Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(8), 915–926. <https://doi.org/10.17977/um063v1i8p915-926>
- Thadi, R., Khoiri, Q., Pujiastuti, T., Setiawan, D., & Rupyanto, R. (2023). Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Potensi dan dan Kesejahteraan Hidup di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. *Abditani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 66–73.
- Tianingsih, W., Sama, I. N., & Kaler, I. K. (2021). Perubahan Sosial Budaya Nelayan Pesisir Kedungrejo. *Humanis: Journal of Arts and Humanities*, 25(2), 242. <https://doi.org/10.24843/jh.2021.v25.i02.p13>
- Wahyudi, R., Fauzi, Y., & Rizal, J. (2023). Analisis Kemiskinan Ekstrem Provinsi Bengkulu Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (Gwr) Dengan Pembobot Adaptive Gaussian Kernel Dan Adaptive Bi-Square. *Journal of Mathematics UNP*, 8(2), 134–149. <https://doi.org/10.24036/unpjomath.v8i2.14914>
- WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. In *World Commission on Environment and Development* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/07488008808408783>